

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ukuran daerah

2.1.1.1 Pengertian Ukuran Daerah

Ukuran daerah merupakan besar kecilnya suatu daerah yang bisa diukur menggunakan total asetnya Noviyanti & Kiswanto (2016), aset tersebut dapat digunakan sebagai indikator ukuran pemerintah daerah.

Menurut Aulia dan Rahmawati (2020) ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai semakin besarnya total aset pemerintah daerah semakin besar peluang pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional daerahnya dan memenuhi kewajiban daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah yang besar dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah (Aziz, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana pemanfaatan ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk persediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber data yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

Semakin besar ukuran daerah, semakin besar pula peluang pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah guna membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik.

2.1.1.2 Pengukuran Ukuran Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan beberapa cara. Menurut Damanpour (1991) dalam (I. P. Sari, 2016) Ukuran Pemerintah Daerah dapat diukur berdasarkan total aset, banyak pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Berdasarkan cara diatas, pengukuran pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah = total aset
2. Ukuran pemerintah daerah = Jumlah pegawai
3. Ukuran pemerintah daerah = total pendapatan
4. Ukuran pemerintah daerah = tingkat produktivitas

Pengukuran variabel dilakukan dengan menghitung total aset dalam laporan keuangan bagian neraca. Berdasarkan uraian diatas penulis memilih Total aset sebagai alat untuk mengukur Ukuran Pemerintah Daerah dalam penelitian ini. Total aset dipilih karena menggambarkan kapasitas dan ekonomi riil yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Aset aset ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai cara seperti

mengoptimalkan investasi aset yang dimiliki, mengelola kekayaan dengan strategis dan memanfaatkan aset tetap untuk sewa. Daerah yang lebih besar umumnya memiliki basis untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Ketika aset dikelola secara optimal efektivitas kinerja keuangan daerah akan meningkat. Sehingga, penggunaan total aset sebagai indikator relevan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Tingkat Ketergantungan

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Ketergantungan

Menurut Aulia dan Rahmawaty (2020) Tingkat ketergantungan daerah dapat dinyatakan dengan besarnya dana perimbangan yang diserahkan pusat kepada pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan daerah pada pusat dapat dilihat dari besarnya pendapatan transfer atau dana perimbangan yang diterima (Noviyanti dan Kiswanto 2016).

Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Pengukuran Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat ketergantungan diukur dalam penelitian ini diukur menggunakan perbandingan dana perimbangan terhadap total pendapatan yang diukur menggunakan proksi yang sama dengan penelitian Aulia & Rahmawati (2020) Dengan rumus:

$$\text{tingkat ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tabel 2.1**Kriteria Tingkat Ketergantunga daerah**

Tingkat Ketergantungan	Precentage (%)	Kategori
Sangat Tinggi	>75%	Ketergantungan sangat Tinggi
Tinggi	50%-75%	Ketergantungan Tinggi
Sedang	25%-50%	Ketergantungan Sedang
Rendah	<25%	Ketergantungan Rendah

Sumber: Halim (2014)

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Halim, 2012).

1. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentansi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Pengalokasian DBH ditujukan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antar pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

3. Dana Alokasi khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian sebuah daerah dalam mengenali dan memanfaatkan semua sumber daya asli daerahnya, guna mendukung jalannya sistem pemerintahan.

Kinerja Keuangan Daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya (Musdirohmah & Sahri, 2022).

Menurut Anynda & Hermanto (2021) Kinerja Keuangan Daerah Merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan daerah dapat meningkat jika dapat mengimplementasikan kegiatan dengan benar. Kinerja keuangan yang berkualitas merupakan pencapaian yang membuat masyarakat sejahtera.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2018) bertujuan untuk:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah
2. Ukuran kinerja membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja
3. Untuk meningkatkan efesien dan efektivitas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan menurut Halim (2018) adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}}$$

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan daerah terhadap pusat semakin rendah begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang ditargetkan selama periode waktu yang ditetapkan. Anyinda & Hermanto (2021). Semakin tinggi rasio atau semakin tinggi realisasi penerimaan PAD maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah begitu pula sebaliknya. Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui anggaran yang dimiliki pemerintah mengalami pertumbuhan yang positif atau negatif.

Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total PAD yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total PAD yang dihitung pada tahun ke-0 (sebelum n)

Penghitungan rasio bertujuan untuk menilai potensi daerah yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan dikatakan positif saat belanja operasi rendah diikuti semakin tingginya nilai total pendapatan daerah, PAD, dan belanja modal. Jika semakin tinggi TPD, PAD, dan belanja operasional diikuti semakin rendahnya belanja modal pertumbuhan daerah negatif.

Dalam penelitian ini rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu mengukur kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan yang di rencanakan dibanding dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ulum, 2012).

2.1.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai acuan dalam menyusun penelitian.

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai bentuk perbandingan dan gambaran bagi penulis dalam

menyusun penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini:

1. Rafika Aulia dan rahmawati (2020) Universitas Syiah Kuala dengan judul “Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemakmuran Daerah berpengaruh negatif signifikan, Ukuran Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah daerah (diukur menggunakan total aset) yang lebih besar memudahkan operasional dan pelayanan publik sehingga meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah. Tingkat Ketergantungan Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
2. Nur Ade Noviyanty dan Kiswanto dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketergantungan pada pusat dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, menunjukkan bahwa dana transfer dan realisasi belanja mendorong perbaikan layanan publik dan efisien anggaran. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran Pemerintah daerah, Tingkat Kekayaan Daerah (PAD) dan Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
3. Indah Puspita sari (2016) Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Lverage,

Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah” hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Lverage dan ukuran legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

4. Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) Universitas Udaya dengan judul “Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah” hasil penelitian menunjukkan Ukuran pemerintah daerah yang diproposikan dengan total aset memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini disebabkan perubahan metode penilaian aset tanah yang menyebabkan fluktuasi nilai aset. Pendapatan asli daerah dan belanja modal menunjukan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
5. Lia Angraini, Sri Rahayu, junaidi (2019) Universitas Jambi dengan judul ”Pengaruh Karatetistik pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah” hasil penelitian menunjukan Tingkat kekayaan daerah (PAD) dan tingkat ketergantungan daerah (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah, belanja modal , ukuran legislatif, dan leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara simultan keenam variabel independen tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan kota/kabupaten di provinsi jambi.

6. Parassela Teguh Primadiva, Dini Rosdini, Sri Mulyani (2021) Universitas Padjadjaran dengan judul “Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah” dengan hasil penelitian tingkat kekayaan (PAD) dan ketergantungan kepada daerah (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan dan ketergantungan fiskal dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik, jika dikelola secara efisien.
7. Meidy Patricia Adinata dan David Efendi (2022) STIESIA Surabaya dengan judul “Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Jawa Timur” dengan hasil Leverage dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
8. Adnan Abdul Aziz dan Eny Kusmawati (2024) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” dengan hasil Tingkat ketergantungan pada pusat adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran daerah, kekayaan daerah, pertumbuhan ekonomi dan opini audit BPK tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

9. Rizki Artya Rahma Putri dan Lailatul Amanah (2020) STIESIA Surabaya dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” dengan hasil penelitian. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan, yang berarti masih tingginya tingkat ketergantungan kepada pusat.
10. Annas L. Mappies (2018) STIEM Bongaya, Makasar dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan” dengan hasil penelitian. Ketergantungan fiskal (DAU) dan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran legislatif dan temuan Audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran daerah, PAD dan opini audit BPK tidak berpengaruh signifikan.
11. Anisa Musdirohmah, Sunardi dan Yulian Sahri (2022) Universitas Muhammadiyah Palembang yang judul. “Pengaruh Ukuran Legislatif, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL” dengan hasil penelitian. Ukuran legislatif dan tingkat ketergantungan pada pusat (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Tingkat kekayaan pemerintah daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

12. Rudythia Dwitama dan Sri Rahayu (2020) Universitas Telkom yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Dengan hasil penelitian secara simultan ketiga variabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran daerah tidak berpengaruh berdasarkan rasio efesiensi, intergonomental tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dan opini audit berpengaruh negatif berdasarkan rasio efektivitas. Berdasarkan rasio efesiensi opini publik berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
13. Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabila Salsa Fahira (2021) Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daearah”. Dengan hasil penelitian PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuanagan daerah. Implikasi dari hasil tersebut adalah bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada Dana perimbangan pusat.
14. Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo (2018) Universitas Islam Majapahit & IKIP Budi Utomo Malang. Yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur” dengan hasil penelitian Intergovernmental Revenue (Dana perimbangan terhadap pendapatan)

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

15. Kusnadewi Lestari, Sri Rahayu dan Yudi (2018) Universitas Jambi. Yang berjudul “Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan, Tingkat Ketergantungan, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah” dengan hasil peneliti Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
16. Asmaul Aziz (2016) Universitas Islam Majapahit Mojokerto yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada kota/kabupaten di Jawa Timur)” dengan hasil penelitian Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan, daerah dengan aset besar cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
17. Indah Setiani dan Ismunawan (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Dengan hasil penelitian Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja

keuangan daerah. Tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

18. Ika Novia Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati dan Dumadi (2022) Universitas Muhadi Setiabudi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah” dengan hasil penelitian Pendapaan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
19. Putri Meilanda, Periansya Periansya, dan Rosy Armaini (2023) Universitas Politeknik Negri Sriwijaya. Yang berjudul “Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan” dengan hasil penelitian Kemakmuran daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan tingkat ketergantunga berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
20. Kumba Digdowiseiso, Bambang Subianto dan Reza Dwi Cahyono (2022) Universitas Nasional yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

21. Ramlah, Syilvia Sjarlis, Muhammad Salim Sultan (2023) ITB Nobel Indonesia Makassar yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Dengan hasil penelitian Pendapatan asli daerah dan ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Rafika Aulia & Rahmawaty 2020 Pengaruh kemakmuran daerah, ukuran daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh	• Ukuran daerah • Tingkat ketergantungan • Kinerja Keuangan daerah	• Kemakmuran Daerah	Kemakmuran daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.5 No.4 November 2020, Halaman 584-598.
2.	Nur Ade Noviyanti & Kiswanto 2016, Pengaruh Karakteristik pemerintah daerah, Temuan	• Ukuran Daerah • Tingkat Ketergantungan	• Tingkat Kekayaan Daerah • Belanja Daerah	Ukuran Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Daerah. Tingkat Kekayaan Dan Temuan BPK	Jurnal Accounting Analysis Journal (AAJ), Vol, 5, No. 1 tahun 2016.

	Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		• Tingkat Legislatif • Temuan Audit BPK	tidak berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Tingkat ketergantungan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap kinerja Keuangan Daerah. Belanja Daerah Berpengaruh Secara Signifikan. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Institusi Universitas Negeri Semarang.
3.	Indah Puspita Sari 2016 Pengaruh Ukuran Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah studi pada kabupaten/kota di pulau sumatera	• Ukuran Pemerintah Daerah • Dana Perimbangan	• PAD • Leverage • Ukuran Legislatif	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Laverange dan Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	JOM FEKOM, Vol. 3 No. 1, Febuari 2016
4.	Ni Made Diah Permata Sari & ketut Mustanda, 2019 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,	• Ukuran Pemerintah Daerah	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal	Ukuran Pemerintah Daerah Tidak berkontribusi terhadap kinerja keuangan daerah bahkan	E-Journal Manajemen , Vol. 8, No. 8, Tahun 2019,

	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah			berpengaruh secara negatif. PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	halaman 4759-4787
5.	Lia Anggaraini, Sri Rahayu, Junaidi 2019	• Ukuran Daerah • Tingkat Keterangan tungan pada Pusat	• Tingkat Kekayaan Daerah • Rasio Belanja Modal • Ukuran Legislatif • Lverage	Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Belanja Modal, Ukuran Legislatif dan Lverage Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Tingkat Kekayaan daerah dan Tingkat Ketergantungan Berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	
6.	Parasella, Pangestu parimadiva, Dini Rosdiini, Sri Mulyani 2021 Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	• Tingkat Keterangan tungan Daerah	• Tingkat Kekayaan Daerah	Kedua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Daerah.	Jurnal Paradigma Ekonomi, Vol. 16 No. 2, April-Juni 2021
7.	Meidy Patricia Adinata & David Efendy 2022	• Ukuran Pemerintah	• Lverage	Lverage dan Ukuran Pemerintah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,

	Pengaruh Laverage, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	• ah Daerah Dana Perimbangan		Daerah Berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan Berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Vol 11 No. 2, Februari 2022
8.	Adnan Abdul Aziz & Eny Kusumawati 2024 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	• Ukuran Pemerintah Daerah • Tingkat Ketergantungan Pada Pusat	• Tingkat Kekayaan • Pertumbuhan Ekonomi • Temuan Audit BPK	Tingkat Ketergantungan Pada pusat berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Empat Variabel lain (Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan, Pertumbuhan Ekonomi dan Temuan Audit BPK) Tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No. 1, 2024.
9.	Rizky Arta Rahma Putri 2020 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan daerah	• Ukuran Pemerintah Daerah. • Dana Perimbangan	• Pendapatan Asli Daerah.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Ukuran Daerah dan Dana perimbangan	Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi Volume: 9, No. 8

					berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	
10.	Annas L. Mappiassee 2018 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan	• Ukuran Daerah • Tingkat Keterangan tunagn Daerah	• Tingkat Kekayaan Daerah • Belanja Daerah • Ukuran Legislatif • Temuan Audit BPK • Opini Audit BPK	Tingkat Ketergantungan dan Belanja Daerah Berpengaruh Positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah. Ukuran Legislatif dan Temuan BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan dan Opini BPK tidak cukup berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	<i>Bogaya Journal For Research in Accounting</i>	
11.	Anisa Musdirohmah, Sunardi dan Yulian Sahri 2022 Pengaruh Ujuran Legislatif, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL	• Tingkat Keterangan tungan Daerah	• Ukuran Legislatif • Tingkat Kekayaan Daerah	Ukuran legislatif dan tingkat ketergantungan pada pusat (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Tingkat kekayaan pemerintah daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume: 11, No. 2	

12.	Rudythia Dwitama dan Sri Rahayu 2020 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	• Ukuran Pemerintah Daerah	• Intergovernmental Revenue • Opini Audit	Secara simultan ketiga variabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah..Ukuran daerah tidak berpengaruh berdasarkan rasio efesiensi, intergonomental tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dan opini audit berpengaruh negatif berdasarkan rasio efektifitas. Berdasarkan rasio efesiensi opini publik berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.	e- Proceeding of Managemen Volume: 7 No.2
13.	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabila Salsa Fahira 2021 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daearah.	• Dana Perimbangan • Ukuran Pemerintah Daerah	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuanagan daerah.	e-ISSN: 3598-8700 Vol: 5 No.2
14.	Tatas Ridho dan Nugroho Eko Novi Prasetyo 2018	• Ukuran Pemerintah Daerah	• Belanja daerah	Intergovernmental Revenue (dana perimbangan terhadap	p-ISSN: 2302-6251 p-ISSN: 2477-4995

	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.	• Intergovernmental Revenue (dana perimbangan terhadap pendapatan)		pendapatan) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	
15.	Kusnadewi Lestari, Sri Rahayu dan Yudi 2018 Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan, Tingkat Ketergantungan, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah.	• Ukuran Daerah • Tingkat Ketergantungan	• Tingkat Kekayaan • Belanja Modal • Temuan Audit BPK	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	
16.	Asmaul Aziz, 2016 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada kota/kabupaten di Jawa Timur)	• Ukuran Pemerintah Daerah • Intergovernmental Revenue (Dana Perimbangan)	• Belanja Daerah	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan, daerah dengan aset besar cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Intergovernmental revenue berpengaruh	EKSIS Vol. XI No. 1.2016

				positif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah	
17.	Indah Setiani dan ismunawan 2022 Pengaruh Penggangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	• Tingkat Ketergantungan	• Pengaruh Penggangguran • Pertumbuhan Ekonomi • Kemiskinan	Penggangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	JEMBA (Jurna Ekonomi dan Menejemen ,Bisnis dan Akuntansi) Vol 1 No.3, mei 2022
18.	Ika Novia Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati dan Dumadi 2022 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah	• Dana Perimbangan	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	JEMBA Vol. 7, No 1, oktober 2022
19.	Putri Meilanda, Periansya Periansya, dan	• Ukuran Daerah	• Kemakmuran Daerah	Kemakmuran daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh	Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN:

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan berjalannya Otonomi Daerah yang diatur undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan diperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan Hak wewenang dan kewajiban yang dimiliki daerah otonomi dalam mengurus sendiri daerahnya. Artinya setiap daerah dituntut mandiri dalam mengatur keuangan daerah termasuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu aspek Otonomi Daerah bisa dikatakan berhasil yaitu Kemampuan daerah dalam memperoleh keuangan nya sendiri dan tidak bergantung pada dana perimbangan dari pusat.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *agency theory*, berdasarkan teori keagenan pemerintah daerah sebagai agen yang baik diharapkan mampu menunjukkan kinerja keuangan yang baik terhadap masyarakat (prinsipal) dengan tujuan masyarakat diberikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan teori keagenan terdapat hubungan dengan ukuran pemerintah daerah. Dalam teori ini ukuran daerah yang diproksikan menggunakan aset daerah dipandang sebagai skala operasional yang dipercaya oleh masyarakat (parinsipal) kepada pemerintah daerah (agen). Pemerintah daerah sebagai agen diharapkan dapat mengelola aset yang dimiliki oleh daerah secara maksimal, untuk mendapatkan asli daerah yang lebih besar dan meningkatkan efektivitas kinerja keuangan.

Untuk memberikan hasil yang optimal terhadap masyarakat perlu didukung oleh aset yang memadai. Maka semakin besarnya Ukuran Daerah yang ditandai dengan semakin besar total aset diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik ketika didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah daerah yang memiliki ukuran daerah yang besar dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran daerah kecil. Pernyataan didukung penelitian yang dilakukan (Aziz, 2016) semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai semakin besarnya total aset pemerintah daerah semakin besar peluang pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional daerahnya dan memenuhi kewajiban daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah yang besar dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (I. P. Sari, 2016) dan (Adinata & Efendi, 2022) Artinya ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan guna meningkatkan kinerja keuangan daerah.

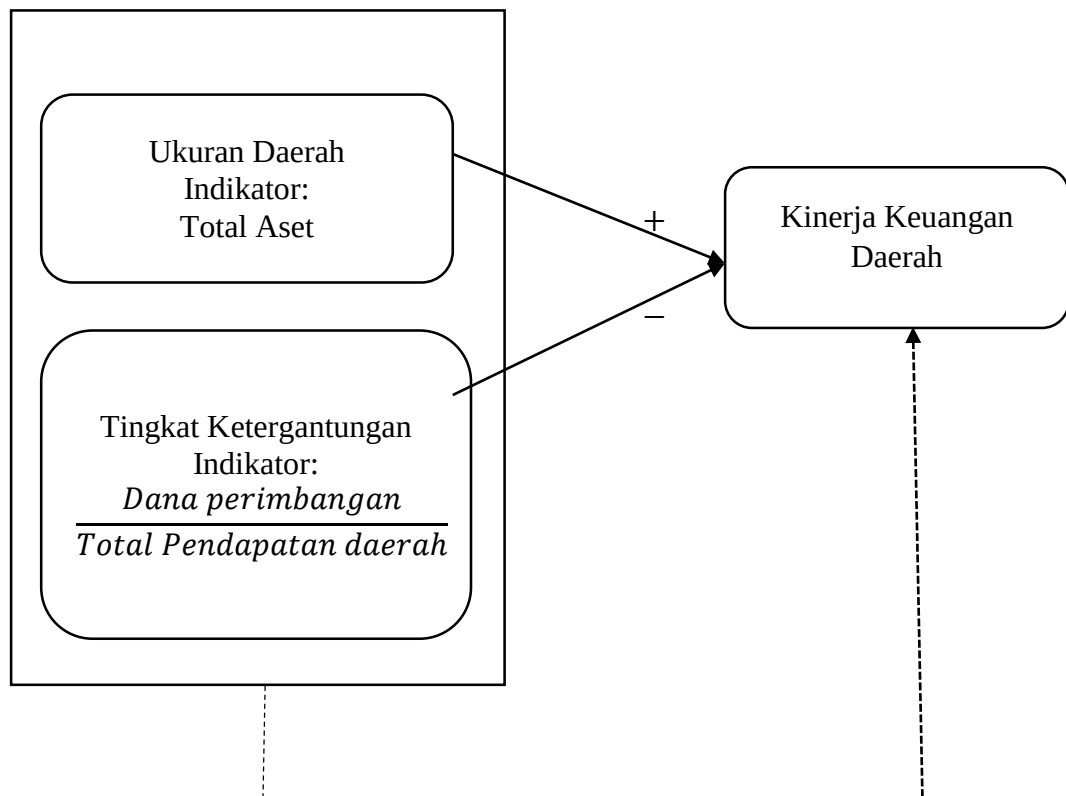
Tingkat ketergantungan memiliki hubungan dengan teori keagenan dimana pemerintah pusat sebagai pemberi dana berperan sebagai prinsipal sementara pemerintah daerah sebagai agen yang menerima dan mengelola dana tersebut. Ketika pemerintah daerah sebagai agen sangat bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pusat, kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang berada di daerahnya dalam pengoptimalan

pendapatan asli daerah akan berkurang. Adanya jaminan dana perimbangan yang besar dari pusat akan membuat agen kurang termotivasi untuk bekerja keras mencapai kemandirian fiskal, yang pada akhirnya menyebabkan efektivitas keuangan memburuk.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Halim, 2012).

Tingkat ketergantungan yang diukur menggunakan perbandingan antara dana perimbangan terhadap total pendapatan diukur menggunakan proksi yang sama dengan penelitian Aulia & Rahmawati (2020). Semakin besar tingkat ketergantungan dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) mendukung pernyataan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Meilanda et al., 2023).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh ukuran daerah dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan daerah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2021-2023. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Keterangan:

—————→ = Hubungan Parsial

- - - - -→ = Hubungan Simultan

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan penemuan beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023.

- 2) Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023.
- 3) Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023.